

**PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI**

SANIA PIANA SARI, ADE NURMA JAYA, SRI ELIYANTI
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

adenurmajaya@gmail.com

srieliyanti30@gmail.com

soniapianasari@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of functional supervision on the quality of public service at the Tourism and Culture Office Of Kerinci Regency. Respondents in this study were all civil servants in the Tourism and Culture Office Of Kerinci Regency, totaling 20 people. The analytical tool used in this study is Simple Regression, by conducting regression tests. The result of the study show that there is a significant influence between Functional Supervision on the Quality of Public Services at The Tourism and Culture Office Of Kerinci Regency. This can be proven and the coefficient test or test turn out to be a tining of 13,955 with a significance level of 0,00 ($\alpha = 0,05 > 0,00$) Referring to the calculation above, it can be decided as follow were t test label or $13,955 > 2,101$, than H_0 is rejected H_a is accepted meaning yes, there is a significant influence between Functional Supervision on the Quality Of Public Service at the Office Tourism and Culture Kerinci Regency. 2. It is know that the magnitude of the influence of Functional Supervision (X) on the Quality of Public Service (Y) is 91,5% while the remaining 8,5% is influenced by other variables not examined.

Keywords : Functional Supervision and Quality Public Services

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten **Kerinci**. Responden dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci yang berjumlah 20 orang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Sederhana, dengan melakukan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengawasan Fungsional terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Hal ini dapat dibuktikan dari uji *coefficient* atau uji t_{tes} ternyata didapat t_{hitung} sebesar 13.955. Dengan tingkat signifikansi 0,00 ($\alpha = 0,05 > 0,00$). Merujuk pada perhitungan diatas maka dapat diputuskan sebagai berikut : dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $13.955 > 2,101$, maka H_0 ditolak H_a diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengawasan Fungsional terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. 2. Diketahui besarnya pengaruh variabel Pengawasan Fungsional (X) terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Y) adalah sebesar 91,5% sedangkan sisanya sebesar 8,5% dipengaruhi oleh Variabel lain yang tidak diteliti.

Kata kunci : Pengawasan Fungsional dan Kualitas Pelayanan Publik.

I. PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah entitas organisasi yang berskala besar. Seperti halnya organisasi yang bersifat umum mereka memerlukan manajerial dan strukturisasi yang matang. Dari situ kemudian pengawasan menjadi kata kunci utama untuk menuju pada *Good Governance*. Di Indonesia sendiri, kegiatan pengawasan menjadi hal yang wajib untuk mengendalikan dan mengontrol aktivitas pemerintahan agar sesuai dengan *Post Pactum* atau tugas fungsi pokok yang ada. Sifat kesewenang-wenangan para pejabat kenegaraan setidaknya dapat lebih awal secara preventif dapat dihindari.

Salah satu ciri dari pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas publik dan peningkatan pelayanan publik, disamping transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan. Karena itu, pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan. Sebagai dampak dari pemerintahan yang baik yaitu terbentuknya pelayanan publik yang baik pula.

Dalam hal ini maka yang menghubungkan antara pengawasan fungsional terhadap peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah Baswir (2004) menyatakan bahwa “Pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah. Kinerja pemerintah daerah yang dilihat dalam laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauhmana pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh inspektorat propinsi dan kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan amanat dari ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perubahan paradigma pengawasan internal yang telah meluas dari sekedar menemukan penyimpangan ke posisi yang lebih luas yaitu efektifitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan internal pemerintah dalam lingkungan pemerintah propinsi dan kabupaten dalam inspektorat propinsi, kabupaten. Inspektorat adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah, yang secara organisatoris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala daerah, baik gubernur maupun bupati. Kedudukan tersebut menyebabkan independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan akan sulit dilakukan, karena pengaruh dan intervensi dari kepala daerah tidak dapat dihindari, sehingga terkesan bahwa inspektorat propinsi, kabupaten merupakan perangkat daerah, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terkesan lebih melindungi serta mengamankan kebijakan dan kepentingan pribadi kepala daerah daripada melaksanakan pemerintahan daerah dibidang pengawasan. Terjadi banyak penyimpangan dan kejanggalan dalam penyelenggaraan pemerintah yang tidak teratasi dengan baik. Hal tersebut menunjuk bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah belum terlaksana dengan optimal.

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang di laksanakan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Yang dimaksud dengan pengawasan pemerintah adalah pengawasan dari dan terhadap pemerintah, mengapa pemerintah yang berkuasa musti dan harus diawasi, hal tersebut disebabkan oleh karena pemerintah memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar, mengurus dan mengatur segala persoalan rakyat dengan baik dan benar. Fungsi mengatur di serahkan kepada eksekutif yang selanjutnya diawasi legislatif, sedangkan fungsi mengatur di serahkan kepada legislatif yang diawasi oleh rakyat melalui kontrol pers, lembaga swadaya masyarakat, dan

berbagai group penekan yang memilih mereka. Pengawasan dilakukan terhadap pekerjaan serta hasil kerja para birokrat pemerintah terkadang hanya berpikir bagaimana memakai uang (*how to spend the money*) bukan bagaimana memperolehnya secara absah dengan memanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan. Berdasarkan pengamatan awal peneliti ditemui fenomena yang berkenaan dengan Pengawasan Fungsional diantaranya :

1. Kurangnya rasa tanggung jawab bagi pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan atasan hal ini dapat dilihat dari laporan hasil kerja pegawai yang sering terlambat.
2. Seringkali dalam melaksanakan tugas pegawai tidak taat terhadap aturan yang telah ditetapkan, hal ini berhubungan dengan keterlambatan pegawai dalam bekerja.
3. Pegawai sering lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga seringkali mengakibatkan tugas yang diberikan terlambat dari seharusnya.
4. Masih kurang optimalnya pengawasan yang diberikan kepada para pegawai oleh pihak pimpinan.

Sedangkan fenomena yang berhubungan dengan Kualitas Pelayanan pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ditemui masih kurangnya sarana dan prasarana perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas pegawai, hal ini dapat dilihat dari perangkat komputer yang masih kurang.
2. Kurangnya kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas akibat pendidikan dan pelatihan yang minim, hal ini diakibatkan tidak adanya pelatihan khusus bagi staf dalam menangani dibidang pariwisata.
3. Kurang tanggapnya pegawai dalam memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat.
4. Seringkali ditemui diantara pegawai yang kurang ramah dalam menanggapi keluhan dan laporan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan

Menurut Halim dan Damayanti (2007:44) menyatakan Pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
- b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional diantaranya Inspektorat kabupaten/Kota.

Pengertian pengawasan fungsional berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa: "Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian pengusutan, dan penilaian.

Standar Penilaian Pengawasan

Menurut Handoko dalam Yusrizal (2017:3) ada tiga bentuk standar pengawasan yang umum dipakai diantaranya :

1. Standar Fisik, yaitu meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah atau kualitas produk yang dihasilkan.

2. Standar Moneter, yaitu yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya, tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan dan sejenisnya.
3. Standar Waktu, meliputi kecepatan produksi dan proses penyelesaian pekerjaan atau batas waktu suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Jenis-Jenis Pengawasan

Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan menurut Manullang (2006:131) yakni :

1. Waktu pengawasan
Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas :
 2. Pengawasan *preventif*, dimaksudkan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari.
 3. Pengawasan *repressif*, dimaksudkan pengawasan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.
4. Objek pengawasan
Berdasarkan objek pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidang bidang sebagai berikut:
 - 1) produksi,
 - 2) keuangan,
 - 3) waktu, dan
 - 4) manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

Indikator Pengawasan Fungsional

Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 317) indikator dari Pengawasan Fungsional terdiri dari :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Pelayanan Publik

Menurut Albercht dalam Lovelock, 1992 (dalam Sedarmayanti 2010:243) pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis. Selanjutnya Monir (dalam Harbani Pasolong 2013: 128), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Berdasarkan Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga pelayanan dari instansi serta BUMN/BUMD. Pengelompokkan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri- ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu :

1. Pelayanan administratif,
2. Pelayanan barang,
3. Pelayanan jasa.

Strategi Pelayanan Publik

Strategi pelayanan prima yang mengacu kepuasan/keinginan pelanggan dapat ditempuh melalui:

- a. Implementasi visi misi pelayanan pada semua tingkat yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (pelanggan)
- b. Hakikat pelayanan prima disepakati untuk dilaksanakan oleh semua apratur yang memberi pelayanan.
- c. Dalam pelaksanaan pelayanan prima, didukung sistem dan lingkungan yang dapat memotivasi anggota organisasi untuk melaksanakan pelayanan prima.
- d. Pelaksanaan pelayanan prima aparatur pemerintah, didukung sumber daya manusia, dana dan teknologi canggih tempat guna.
- e. Pelayanan prima dapat berhasil guna, apabila organisasi menerbitkan standar pelayanan prima yang di dapat dijadikan pedoman dalam melayani dan panduan bagi pelanggan yang memerlukan jasa pelayanan.

Indikator Kualitas Pelayanan

Indikator Kualitas Pelayanan

Sinamba dkk. (dalam Harbani Pasolong 2013:133), mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari:

1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, muda dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas.
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan deskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan;
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Menurut Zeithhaml- Parasurman- Berry (dalam Harbani Pasolong 2013: 135), untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi servqual tersebut, yaitu:

1. *Tangibles* (berwujud): kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.
2. *Reliability* (keandalan) : kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya.
3. *Responsivess* (Tanggung jawab): kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
4. *Assurance* (jaminan): kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam menyakinkan kepercayaan konsumen.
5. *Emphaty* (perhatian): sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:39) Pendekatan Kuantitatif yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan rumus berdasarkan teori yang berkaitan dengan, Pengawasan Fungsional, dan Kualitas Pelayanan Publik.

Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan adanya isu yang berkembang tentang kualitas pelayanan pegawai dan adanya kesediaan instansi terkait dalam memberikan data yang diperlukan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari individu atau orang yang secara langsung diperoleh dilapangan/objek penelitian berasal dari Aparatur Sipil Negara yang ada di kantor Satuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Sedangkan data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari lokasi penelitian yang dapat berupa, literatur, buku dan laporan lainnya.

Variabel dan Definisi Operasional

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri atas 3 (tiga) diantaranya:

1. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga/badan/unit dalam melakukan pengawasannya melalui pemeriksaan, pengkajian penyusutan, dan penilaian terhadap pemerintahan daerah yang dilakukan oleh departemen sektoral maupun departemen yang menyelenggarakan pemerintahan umum (Kementerian Dalam Negeri).

2. Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Teknik Analisa Data

Skala Likert

Data diperoleh dari instrumen penelitian maka data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjelaskan variabel penelitian dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*, jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala *likert* mempunyai degradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata. Dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Sangat Setuju(SS) | Skor 4 |
| 2. Setuju (S) | Skor 3 |
| 3. Tidak Setuju(TS) | Skor 2 |
| 4. Sangat Tidak Setuju (STS) | Skor 1 |

Regresi Linear

Menurut Sugiyono (2018:90) Analisis Regresi Linear Sederhana adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh fungsi atau pengaruh kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linear Sederhana dengan penyelesaian menggunakan SPSS versi 16.⁰⁰. Model persamaan untuk analisa regresi berganda adalah :

$$Y = a + bX \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y : Kualitas Pelayanan Publik
- b : Koefisien regresi masing-masing variabel.
- X : Pengawasan Fungsional
- a : Konstanta

Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besar kecilnya sumbangan X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

- KD = Koefisien Determinasi
- r = Koefisien Korelasi

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan rumus:

Bentuk Rumus :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

- t = Nilai signifikan
- r² = Koefisien korelasi
- n = Jumlah sampel

Selanjutnya hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan taraf kesalahan α 5 % dengan tingkat kepercayaan 95%. Dilakukan uji dua pihak (arah). Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika t_{hitung} ≥ t_{tabel}, maka H₀ di tolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengawasan Fungsional terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.
2. Jika t_{hitung} < t_{tabel}, maka H₀ diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengawasan Fungsional terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persentase Sebaran Kuesioner Penelitian

Tabel 4.5.
Persentase Sebaran Kuesioner Penelitian

NO	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Jumlah kuesioner disebar	25	100%
2	Jumlah kuesioner yang dikembalikan	20	80 %
3	Jumlah kuesioner yang tidak diisi/cacat	-	-
4	Jumlah kuesioner yang tidak dikembalikan	5	20 %
5	Jumlah kuesioner yang dapat dianalisis lebih lanjut	20	80 %

Sumber : Data Primer diolah 2022

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.6
Hasil analisis Regresi Linear Sederhana pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.414	1.661		8.078	.000
	Pengawasan Fungsional	.628	.045	.957	13.955	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik

Dari tabel 4.6. diatas dapat digambarkan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut : $Y = 13.414 + 0,628x$

Dengan penjelasan dari persamaan diatas adalah :

1. Nilai a = 13.414 adalah nilai konstanta artinya ketika variabel Pengawasan Fungsional dianggap konstan atau tidak ada perubahan, maka besarnya variabel Kualitas Pelayanan Publik (Y) adalah sebesar 13.414.
2. Nilai b = + 0,628 adalah nilai koefisien regresi dari variabel Kualitas Pelayanan Publik. Artinya tanda positif mengartikan bahwa terjadi peningkatan dari Kualitas Pelayanan Publik, jika Pengawasan Fungsional dinaikkan 100% maka Kualitas Pelayanan Publik akan meningkat sebesar 62,8%.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 4.7
Hasil analisis besarnya pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.957 ^a	.915	.911	1.059	2.360

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Fungsional

b. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan analisis tabel 4.7 terhadap *R Square* (determinasi) adalah 0,915 (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi 0,957). *RSquare* dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini sebesar 0,915 atau 91,5% kontribusi variabel Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, sedangkan sisanya sebesar 8,5% dipengaruhi oleh Faktor lain yang tidak diteliti.

4. Uji-T

Untuk menguji signifikansi pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci maka dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8
Hasil ringkasan uji t pengaruh Pengawasan Fungsional (X)
terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Y)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.414	1.661		8.078	.000
Pengawasan Fungsional	.628	.045	.957	13.955	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan tabel 4.8 dari uji *coefficient* atau uji t tes ternyata didapat t_{hitung} sebesar 13.955. Dengan tingkat signifikansi 0,00 ($\alpha = 0,05 > 0,00$). Merujuk pada perhitungan diatas maka dapat diputuskan sebagai berikut : dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $13.955 > 2,101$, maka H_0 ditolak H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengawasan Fungsional terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dan analisis bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengawasan Fungsional terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Hal ini dapat dibuktikan dari uji *coefficient* atau uji t_{tes} ternyata didapat t_{hitung} sebesar 13.955. Dengan tingkat signifikansi 0,00 ($\alpha = 0,05 > 0,00$). Merujuk pada perhitungan diatas maka dapat diputuskan sebagai berikut : dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $13.955 > 2,101$, maka H_0 ditolak H_a diterima.
2. Diketahui besarnya pengaruh variabel Pengawasan Fungsional (X) terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Y) adalah sebesar 91,5% sedangkan sisanya sebesar 8,55% dipengaruhi oleh Variabel lain yang tidak diteliti.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN),

serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian peneliti ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Callahan, 2007, organisasi perilaku struktur dan proses, Jakarta, Binarupa Aksara
- Dewi, Sartika, 2014, Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai BKD Kabupaten kerinci, STIA-Nusa Sungai Penuh.
- Fathoni, 2006, Manajeme Sumber Daya Manusia, Gajahmungkur, Semarang.
- Fitra. 2005. Perilaku Organisasi dan Pengawasan, Ed.12. Andi Ofset. Yogyakarta
- Halim, 2007, Pentingnya Pengawasan Internal, (Cetakan Pertama), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Handoko, 2009. Kepemimpinan dan Sistem Pengawasan Karyawan (Cetakan Pertama). Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu SP, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia, Dasar dan Kunci Keberhasilan, Jakarta, Gunung Agung.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 23.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007), hlm. 815.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm.23.
- Marsono, 2005, Fungsi Pengawasan Internal, Yayasan pembina Keluarga UPN, Yogyakarta
- Moeljono. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta
- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tatta Usaha Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 37
- Mulyana. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 10. Jakarta: PT. Indeks.
- Nawawi, Hadari, 2006, Manajemen Kinerja, Andi Ofset. Yogyakarta
- Nugroho. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nurcholis. 2007. Sistem Penawasan Internal, Bumi Aksara. Jakarta
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 142
- Robbins, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Mandar Baru, Bandung
- Samsudin, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia (Cetakan II). Penerbit STIE YKPN. Yogyakarta
- Sarwoto, Anwar. 2003. Dasar-dasar Perilaku Organisasi (Cetakan Pertama). Yogyakarta: UII Press.
- Siagian. Henri. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Persada. Yogyakarta
- Silalahi, Ulber, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia (Cetakan II). Penerbit STIE YKPN. Yogyakarta